

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI

La Ode Muhammad Kawa Tomi Diki

NPP. 29. 1679

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.1679@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by findings in the field related to wastemanagement in the community. Every human activity in the context of meeting the needs of daily life will produce waste which as a result can pollute the surrounding environment. Waste management in Kendari City still needs to be improved considering that in the future there will be many challenges and obstacles in waste management in supporting independentwaste management. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Waste Management in Kendari City is a form of waste management policy which aims as a legal basis to create a clean Kendari City from waste. Referring to this problem. **Method:** The method used by the author in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques that the author uses are observation, interviews and documentation. The author uses technical data analysis with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Waste Management in Kendari Barat District, Kendari City has not been implemented optimally this is due to the low public awareness of the importance of waste management, so it can be said that the socialization carried out by the government has not been maximized and has not touched all society. **Conclusion:** The West Kendari District Government must always educate the West Kendari District community in disposing of waste in the places provided and teach them not to be apathetic to the surrounding environment. and increase the number of workers who are still productive because in the process of transporting homes and bringing waste to the TPA requires a large amount of energy so that the waste management process runs well and optimally.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Management

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini di latar belakang oleh penemuan dilapangan yang terjadi terkait pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Setiap kegiatan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akan menghasilkan sampah yang sebagai akibatnya bisa mencemari lingkungan disekitarnya. Pengelolaan sampah di Kota Kendari masih perlu ditingkatkan lagi mengingat kedepannya akan banyak tantangan dan kendala dalam pengelolaan sampah dalam mendukung pengelolaan sampah secara mandiri. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Kendari dengan judul Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknis analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. **Kesimpulan:** Pemerintah Kecamatan Kendari Barat harus selalu mengedukasi masyarakat kecamatan Kendari Barat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan mengajarkan agar tidak apatis terhadap lingkungan sekitar. serta menambah jumlah petugas yang berusia masih produktif karena dalam proses pengangkutan kerumah-rumah dan membawa sampah ke TPA membutuhkan tenaga yang besar sehingga proses pengelolaan sampah berjalan baik dan optimal, Dinas Lingkungan Hidup juga harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih kurang agar proses pengelolaan sampah berjalan baik dan optimal.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara terpadat ke empat setelah China, India dan Amerika Serikat. Kepedatan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab buruknya kebersihan karena semakin banyak penduduk makan semakin banyak pula sampah yang ada dimasyarakat. Semakin tinggi pula status ekonomi seseorang maka semakin banyak pula sampah yang di hasilkan per kapita, dan kemajuan teknologi akan meningkatkan kuantitas dan kualitas sampah. Berbicara tentang sampah yang dimana yang dimuat di karya ilmiah rancangan undang-undang tentang sampah adalah sisa kegiatan ekonomi

dan atau kegiatan yang berbentuk padat atau setengah padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat biodegradable atau non-biodegradable, yang dianggap tidak layak pakai dan dibuang ke lingkungan. Jumlah penduduk yang tinggi tentunya mengakibatkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap orang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan perubahan pola produksi dan konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi, produksi sampah juga meningkat, serta beragam dan kompleksnya sampah yang dihasilkan seiring berkembangnya manusia atau penduduk yang jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi polemik dan akan menimbulkan masalah dan akibat negative bagi masyarakat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan tersebut berdampak pada kondisi kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang baik untuk meminimalisir dampak negatif saat ini atau di masa depan. Kota Kendari yang berada di Sulawesi Tenggara kini sedang padat-padatannya dimana para pekerja asing yang masuk dari China dan bekerja disana mengakibatkan tingkat kepadatan semakin tinggi dan berdampak pada tingkat konsumsi yang dimana dari hal ini dapat disimpulkan akan terjadinya pelonjakan pada tingkat pembuangan limbah seperti contohnya sampah plastik dan sampah rumah tangga lainnya, dengan tingkat kepadatan dan perkembangan dimasyarakat bisa dipastikan pemerintah harus mengatur soal ini lebih lanjut dan tidak bisa dianggap sepele demi kenyamanan penduduk dimasa ini dan penduduk dimasa akan datang. Pemerintah Kota Kendari dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan badan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum di dalam mana setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar dalam Nain (2007:11). Akan tetapi yang terjadi di lapangan penanganan dan pengelolaan sampah sendiri dibebankan kepada pemerintah. Minimnya kesadaran dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah serta minimnya tempat pembuangan akhir (TPA) yang tersedia membuat masalah ini berdampak besar bagi lingkungan masyarakat. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) adalah goal atau tujuan ke 11 yaitu membangun dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan. Pada tahun 2030, mengurangi biaya per kapita dari dampak lingkungan, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk pengolahan limbah perkotaan (Syahdan Nurdin, 2021). Maka dari itu pemerintah Kota Kendari berupaya mengoptimalkan lagi dalam hal pengelolaan sampah di Kota Kendari. Mengingat salah satu tujuan Sustainable Development Goal (SDG) tujuan ke 11 yaitu membangun dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan dengan mengeluarkan kebijakan yaitu perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang dimana perda ini sudah keluar dari 6 tahun lalu tapi pada uraian atau berita di atas kenyataan daripada implementasi kebijakan ini beda dengan yang di harapkan dan sangat jauh berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang dimana masih belum sesuai dengan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang semakin meingkat dari tahun ketahun. Meski pemerintah sudah menetapkan aturan, pengelolaan sampah pasti masih saja ada terjadi penyimpangan yang kita temukan dilapangan. Minimnya kesadaran dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah serta minimnya tempat pembuangan akhir (TPA) yang tersedia membuat masalah ini berdampak besar bagi lingkungan masyarakat. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) adalah goal atau tujuan ke 11 yaitu membangun dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan. Pada tahun 2030, mengurangi biaya per kapita dari dampak lingkungan, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk pengolahan limbah perkotaan (Syahdan Nurdin, 2021). Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penambahan volume sampah yang semakin meningkat, yang dimana lokasi pembuangan sampah akhir di kendari semakin semrawut dan lokasi pembuangan sampah akhir di kendari hanya satu yang dimana berlokasi administrasi di Kelurahan Puwatu, Kota Kendari. Maka dari itu pemerintah Kota Kendari berupaya mengoptimalkan lagi dalam hal pengelolaan sampah di Kota Kendari. Mengingat salah satu tujuan Sustainable Development Goal (SDG) tujuan ke 11 yaitu membangun dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan dengan mengeluarkan kebijakan yaitu perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang dimana perda ini sudah keluar dari 6 tahun lalu tapi pada uraian atau berita di atas kenyataan dari pada implementasi kebijakan ini beda dengan yang di harapkan dan sangat jauh berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang dimana masih belum sesuai dengan implementasi kebijakan tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengkaji beberapa penelitian terkait kebijakan pengelolaan sampah sebagai pembading dari penelitian yang akan di lakukan. Biasanya hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk table atau dalam bentuk narasi. Untuk mendukung teori dalam penelitian, peneliti menggunakan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan. Peneliti menggunakan tiga penelitian sebelumnya sebagai berikut: Intan Rachmawatie (2015) penelitian berikut dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi” penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Bekasi Penelitian. Berikutnya dilakukan oleh A. Fachhrul Febrianto Ramadhana (2017) penelitian berikut dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kesadaran Kolektif Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan (tinjauan program mtr makassar TA’ tidak rantasa di kelurahan kassi-kassi kecamatan rappocini kota makassar)” penelitian tersebut dilaksanakan dengan bertujuan, Untuk mengetahui faktor penghambat tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat pada kebersihan lingkungan, tinjauan program MTR Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian selanjutnya adalah Mohammad rizal, (2011) dengan judul “Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)” yang dimana ini berbentuk sebuah jurnal dengan metode penelitian kualitatif serta tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di

Kota Donggala dan mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Donggala.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peneliti akan mencoba lebih mendetail pada bagaimana Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Kota Kendari faktor pendukung dan penghambatnya serta bagaimana upaya pemerintah mengatasinya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami implementasi perda nomor 4 tahun 2015 pengelolaan sampah di Kota Kendari. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi berlangsungnya implementasi perda nomor 4 tahun 2015 pengelolaan sampah di Kota Kendari. Untuk mengetahui cara menghadapi faktor penghambat implementasi perda nomor 4 tahun 2015 di Kota Kendari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang- remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis sehingga penulis memilih pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan penelitian kualitatif lebih tepat digunakan dalam riset yang permasalahannya berada di situasi sosial yang dinamis dan kompleks (Sugiyono, 2017: 205). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan Kantor Camat Kendari Barat yaitu sebagai berikut: Camat Kendari Barat, Kabid Persampahan & LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Petugas Kebersihan, Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di kecamatan kendari barat kota kendari menggunakan pendapat Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Perda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle terdiri atas variabel dan indikator yang terdiri dari kebijakan yang indikatornya: kepentingan berpengaruh, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan serta lingkungan implementasi yang juga memiliki beberapa indikator seperti: kekuasaan, karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa, dan tingkat kepatuhan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Merilee S. Grindle dapat menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan cara melihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Untuk menganalisis berkaitan dengan Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2. Isi Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle (Subarsono, 2012:93) juga menetapkan bahwa isi kebijakan menjadial yang paling penting dalam implementasiannya, dimana ia mengkategorikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan apabila isi kebijakannya memiliki enam kriteria yang ia maksudkan yaitu kepentingan-kepentingan terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi perda di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ingin dilihat apakah implementasi perda ini telah memenuhi enam kategori isi kebijakan yang sesuai dengan teori Grindle, berikut ini adalah penjelasan Implementasi Perda No 4 Tahun 2015 ini di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari menurut indikator-indikator dari isi kebijakan.

3.3. Kepentingan Yang Dipengaruhi Oleh Kebijakan

Kebijakan yang termasuk didalamnya ialah suatu peraturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan semua konflik di dalam masyarakat dan konflik di pemerintahan yang melibatkan kepentingan dari beberapa pihak tertentu maupun pihak yang terkait dalam pengimplementasian kebijakan. Beberapa kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan merupakan sasaran utama dari kebijakan tersebut contohnya masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Beberapa kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan adalah indikator yang berpendapat bahwa suatu kebijakan didalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak kepentingan yang membawa pengaruh terhadap pengimplementasiannya.

3.4. Jenis Manfaat Yang Diperoleh

Dalam point Content of Policy yang merupakan isi kebijakan menurut pendapat Merilee S Grindle berusaha untuk menunjukkan dan menjabarkan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memperlihatkan dampak positif dari pengimplementasian kebijakan yang akan dilakukan. Suatu kebijakan yang tentu memberikan manfaat aktual kepada banyak pelaku akan lebih mudah di Implementasikan dibandingkan dengan suatu kebijakan yang tidak bermanfaat. Kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh pemerintah seperti program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukum harus memberikan suatu hal yang bermanfaat, berdampak positif dan dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Semua kebijakan pasti upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat. Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif ataupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan respon yang diberikan oleh objek dari kebijakan tersebut. Begitu pula halnya dengan implementasi perda ini, kebijakan ini merupakan bentuk pengurangan sampah dan juga bentuk menstimulus kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah yang ada di Kota Kendari khususnya di Kecamatan Kendari Barat. penulis menginterpretasikan bahwa ada manfaat yang signifikan yang diperoleh oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pihak Kecamatan Kendari Barat. Pihak pemerintah serta masyarakat dari Implementasi Perda ini juga mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan ini, dimana di Kecamatan Kendari Barat sendiri membuat Bank Sampah yang aktif sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah yang berada di rumah masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang asri dan bersih dan juga dari hasil kreatifitas masyarakat dapat menjadi berkah.

3.5. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Adapun tujuan dalam Implementasi Perda ini didasari karena banyaknya sampah yang ada di Kecamatan Kendari Barat. Program pengelolaan sampah ini didasari oleh Perda Nomor 4 Tahun 2015. Pengelolaan persampahan serta paradigma mengenai sampah yang langsung dibuang ke TPA harus berganti menjadi paradigma baru dimana sampah harus dipilah dari sumbernya lalu dilakukan pengumpulan lalu sampah akan didaur ulang dan sampah yang tidak dapat digunakan lagi dibuang ke TPA. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari perubahan yang ingin dicapai dengan adanya Implementasi sampah ini adalah untuk mengurangi sampah. Perubahan yang diharapkan tidak hanya sekedar mengurangi jumlah sampah yang ada di Kota Kendari khususnya kecamatan Kendari Barat saja, namun adanya Perda ini juga diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk peduli dengan sampah. Derajat perubahan dengan adanya Perda tentang pengelolaan sampah ini dari pemerintah mempunyai tujuan yang baik yaitu adalah untuk mengurangi sampah, mengingat volume sampah di Kota Kendari yang semakin meningkat. Perda ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah, untuk perubahan yang dirasakan masyarakat dengan adanya Perda tentang pengelolaan sampah sangat terasa dalam pengurangan sampah.

3.6 Letak Pengambilan Keputusan

Mengambil suatu keputusan dari sebuah kebijakan memiliki tugas penting dalam melakukan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini harus dijelaskan letak pengambilan suatu keputusan dalam sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Pengambilan suatu keputusan berkaitan dengan para stakeholder yang mana setiap aktivitas atau program harus tepat dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dan keputusan yang diambil juga berkaitan dengan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peranan penting dalam penentuan kesuksesan suatu program pengimplementasian. Isi dari suatu kebijakan akan mengarahkan kepada posisi pengambilan keputusan. Kebijakan dalam bidang tertentu diputuskan dari sejumlah unit pengambil kebijakan dan ada juga kebijakan tertentu yang hanya ditentukan oleh beberapa unit pengambil kebijakan.

3.7 Pelaksanaan Program

Pada saat menjalankan sebuah kebijakan atau kegiatan yang harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan mampu berkompeten dan kapabel demi kesuksesan sebuah kebijakan, maka hal ini harus tertata atau terdata dengan baik. Sesungguhnya proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertugas untuk melakukan kegiatan atau program yang menimpulkan ketaatan dalam kelompok sasaran, melainkan kepada kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung berkaitan dengan perilaku dari semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh kepadatujuan dari suatu kebijakan baik hal negatif maupun positif. Pelaksanaan suatu program merupakan hal penting dari sebuah kebijakan dikarenakan pelaksanaan program adalah pendorong maupun alat yang bertujuan untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan diawal pembuatan suatu kebijakan. Dapat diartikan pelaksana merupakan penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat di dalam suatu kegiatan atau program. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga berperan sebagai tolak ukur dalam melihat sejauh mana suatu kegiatan dilaksanakan.

3.8 Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Pelaksanaan suatu program harus didukung oleh sumber daya yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan lancar. Kesuksesan dari tahapan pengimplementasian dari kebijakan suatu daerah. Jika isi dari suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas, namun apabila imelementator kurang sumber daya untuk melakukan pelaksanaan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Secara keseluruhan penulis menginterpretasikan bahwa pengimplementasian Perda Nomor 4 tahun 2015 ini dengan indikator sumber-sumber yang digunakan dalam pengimplementasiannya sudah cukup memadai. Dimana idealnya bahwa sebuah kebijakan dapat berhasil dilaksanakan apabila didukung dari sumber daya- sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana prasarana.

3.9 Konteks Kebijakan

Selain isi kebijakan yang menjadi faktor menentukan hasil dari implementasi suatu kebijakan, konteks kebijakan juga menjadi aspek penting dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Isi kebijakan selalu dianggap sebagai faktor krusial, dikarenakan dampak nyata atau potensialnya akan bergantung kepada lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Segala kebijakan juga harus mempertimbangkan lingkungan dan konteks dimana administrative dilaksanakan. Berdasarkan dari teori Grindle, ada tiga macam indikator yang menjadi bagian dari variable atau aspek kebijakan ini, diantaranya adalah:kekuasaan, kepentingan dan strategi faktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa.kepatuhan dan daya tanggap. Konteks kebijakan juga perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengetahui hal apasaja yang termasuk ke dalam sebuah implementasi kebijakan. Menurut teori implementasi Merilee S. Grindle, konteks kebijakan adalah faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan.

3.10 Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan Dan Program Atau Strategi Dari Aktor Yang Terlibat

Pada suatu kebijakan perlu memperhatikan kekuatan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan juga program yang digunakan oleh para subjek, bertujuan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, maka kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan dengan lancar. Pelaksanaan dari suatu kebijakan akan berpengaruh dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pembuat kebijakan, pelaksanaan bahkan juga subjek lain di luar itu baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di dalam implementasi Perda Nomor 4 tahun 2015, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan Kecamatan Kendari Barat merupakan implementor dari Perda ini dan pelaksana program ini adalah untuk masyarakat menjadi sasaran dari kebijakan ini.

3.11 Karakteristik Dari Lembaga Dan Rezim Yang Berkuasa

Tempat suatu kebijakan akan dilaksanakan juga akan berpengaruh terhadap kesuksesannya, oleh karena itu pada bagian ini di jelaskan tentang karakteristik dari lembaga yang bersangkutan dengan suatu kebijakan. Pada implementasi yang dibuat, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik *stakeholders* pada hal ini tepat dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Jalannya Perda Nomor 4 Tahun 2015 ini yang ada di Kecamatan Kendari Barat juga dipengaruhi oleh bagaimana sikap pegawai yang sedang melayani masyarakat, bagaimana sikap pegawai Bank Sampah untuk mengajak dan mensosialisasikan program bank sampah yang bertujuan untuk memajukan atau melancarkan jalannya Perda Nomor 4 tahun 2015 yang ada di Kecamatan Kendari Barat. Sikap pegawai di sampah pada saat melayani masyarakat dikatakan cukup baik. Secara keseluruhan, penulis menginterpretasikan bahwa konteks Pelaksanaan Perda Nomor 14 tahun 2015 dengan indikator

karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam pengimplementasiannya sudah cukup baik. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan Kecamatan Kendari Barat Terkait dengan Perda Nomor 14 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sudah dirasa cukup efektif, ditambah lagi sikap pegawai bank sampah yang sudah dirasa cukup baik.

3.12 Tingkat Kepatuhan Dan Adanya Respon Para Pelaksana

Konteks utama kebijakan ini adalah indikator tingkat kemampuan dan adanya respon baik dari petugas atau pelaksana kebijakan sebagai hal yang juga sama pentingnya dalam menentukan siapa pelaksananya, dikarenakan tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan bentuk partisipasi yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Merille S Grindle mengatakan bahwa indikator hal terakhir dari suatu implementasi kebijakan adalah ditentukan dari sejauh mana respon serta ketaatan dari pelaksana untuk menanggapi suatu kebijakan. Pada bagian ini ingin dijelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan Perda Nomor 14 tahun 2015, karena melalui daya tanggap tersebut dapat dinilai sejauh mana para pelaksana mendukung adanya Perda ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat.

3.13 faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan program Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah Petugas yang bertugas, dalam hal ini menyangkut tentang kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing petugas kebersihan sampah yang dari analisis yang sudah dibahas sebelumnya dapat dilihat bahwa kemampuan setiap petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berjalan secara maksimal dilihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa sikap dari petugas sudah cukup baik. Fasilitas, Dalam penerapan kebijakan tentunya fasilitas menjadi faktor penting yang akan menentukan kebijakan itu akan berhasil atau tidak. Pada Implementasi Perda di Kecamatan Kendari Barat ini penulis melihat fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari sudah cukup lengkap, mulai dari Kendaraan angkutan sampah dan juga dari pihak Pemerintah Kecamatan Kendari Barat tempat Bank Sampah yang ada di Kelurahan Lahundape. Dalam hal ini tentunya dirasa sudah cukup baik, Kecamatan Kendari Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari menyediakan berbagai hal atau fasilitas guna mendukung kelancaran Implementasi Perda ini. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini adalah Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat, Masyarakat selaku sasaran dari program pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat dikarenakan masih kurangnya respon dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tentu hal ini akan menjadikan lingkungan menjadi semakin kotor serta kualitas tanah juga akan menurun, karena yang kita tau juga bahwa sampah plastik sangat sulit untuk terurai. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Mau jadi petugas kebersihan. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi petugas kebersihan yang dikarenakan remaja atau usia produktif di kota Kendari kebanyakan menganggap pekerjaan ini dengan sebelah mata karena pekerjaan ini berurusan dengan sampah.

3.14 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Dari Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Didalam setiap kebijakan selalu ada titik lemah atau kelemahan, hal ini tentunya menjadi tantangan dari dinas terkait untuk bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut. Kecamatan Kendari Barat selalu berupaya agar Perda ini terus berjalan, sesuai dari kelemahan yang penulis sebutkan yakni kurangnya kesadaran atau respon masyarakat terkait Perda ini, Pemerintah tentunya akan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya Perda ini selain membuat lingkungan menjadi bersih program ini juga menjadi ajang buat memberishkan daerah kita sendiri, pihak Kecamatan Kendari Barat upaya yang di lakukannya adalah membuat Bank sampah dimana masyarakat di tiap kelurahannya dapat berpartisipasi dalam membuat olahan kreatifitas mereka masing-masing yang dimana dengan itu hasil dari kreatifitasan mereka dapat di tukarkan dengan gas, minyak, beras dan lainnya lagi.

3.15 Diskusi Utama Penelitian

Indonesia menghasilkan sekitar 3,22 juta ton sampah plastik pada setiap tahunnya, yang tidak dikelola dengan baik dan membutuhkan waktu lama untuk dihancurkan sehingga sampah plastic terus tertimbun dan dapat mencemari lautan (Adharsya, 2019). Kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dan pengelolaan sampah yang buruk, diikuti dengan produksi makanan dan minuman dari plastik yang di gunakan sekali pakai ini dapat menyebabkan semakin cepatnya peningkatan sampah pada tiap tahunnya yang akan berdampak pada lingkungan disekitar. Dengan perkembangan teknologi, produksi sampah juga meningkat, serta beragam dan kompleksnya sampah yang dihasilkan seiring berkembangnya manusia atau penduduk yang jika tidak di kelola dengan baik, akan menjadi polemik dan akan menimbulkan masalah dan akibat negative bagi masyarakat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan tersebut berdampak pada kondisi kesehatan, sosial budaya budaya, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang baik untuk meminimalisir dampak negatif saat ini atau di masa depan. Pemerintah Kota Kendari dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan badan. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penambahan volume sampah yang semakin meningkat, yang dimana lokasi pembuangan sampah akhir di kendari semakin semrawut dan lokasi pembuangan sampah akhir di kendari hanya satu yang dimana berlokasi administrasi di Kelurahan Puwatu, Kota Kendari. Maka dari itu pemerintah Kota Kendari berupaya mengoptimalkan lagi dalam hal pengelolaan sampah di Kota Kendari. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.**

3.16 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat, Masyarakat selaku sasaran dari program pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat dikarenakan masih kurangnya respon dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tentu hal ini akan menjadikan lingkungan menjadi semakin kotor serta kualitas tanah juga akan menurun, karena yang kita tau juga bahwa sampah plastik sangat sulit untuk terurai. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Mau jadi petugas kebersihan. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi petugas kebersihan yang dikarenakan remaja atau usia produktif di kota Kendari kebanyakan menganggap pekerjaan ini dengan sebelah mata karena pekerjaan ini berurusan dengan sampah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Kendari Barat oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan baik, namun belum maksimal. Dalam penerapan Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah tentunya memiliki beberapa faktor pendukung juga penghambat dalam pelaksanaannya, berupa Faktor pendukung yang pertama yaitu (a) Petugas yang bertugas dalam hal ini menyangkut tentang kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing petugas kebersihan sampah yang dari analisis yang sudah dibahas sebelumnya dapat dilihat bahwa kemampuan setiap petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berjalan secara maksimal dilihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa sikap dari petugas sudah cukup baik dan yang kedua (b) Fasilitas yang memadai guna kelancaran Perda Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam penerapan kebijakan tentunya fasilitas menjadi faktor penting yang akan menentukan kebijakan itu akan berhasil atau tidak. Faktor penghambat yang pertama yaitu (a) Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat, selaku sasaran dari program pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat dikarenakan masih kurangnya respon dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kemudian penghambat selanjutnya (b) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ingin menjadi petugas kebersihan yang di karenakan remaja atau usia produktif di kota Kendari kebanyakan menganggap pekerjaan ini dengan sebelah mata karena pekerjaan ini berurusan dengan sampah. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup guna menjadikan lingkungan menjadi lebih asri dan bebas dari sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Merilee S. Grindle.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Kendari Barat, Kabid Persampahan & LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S.Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori dan Implementasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media

Bungin, B. “*Metodologi Penelitian Sosial*” Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dunn, William N. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Handoko, T.H 1997. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*

Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE

Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia

Moleong, L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Miles, B. M. & Michael H. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Nain, U. 2007. *Relasi Pemerintah Desa dan Supra Desa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Rizal, M. 2011. Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). *Jurnal Smartek*, 9(2).

Rasyid, R. 2000, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta.

Subarsono, A. G. 2012. *Analisis Kebijakan publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. “*Pengantar Penelitian Hukum*” Jakarta: Rineka Cipta, 1983. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta, CV

-----, 2012. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: ALFABETA

-----, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung:Alfabeta

-----, 2014, “*Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*” Bandung:Alfabeta,

-----, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,

Bandung : Alfabeta.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)

Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: CAPS (Center of Academi Publishing Service)

Sumber Lainnya

<https://www.bps.go.id/stactable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kendari di akses pada tanggal

<https://www.kendarikota.go.id/page/detail/sejarah-kota-kendari>

<https://id.berita.yahoo.com/pengelolaan-sampah-di-kota-kendari-045902007.html>

<https://kendarikota.bps.go.id/stactable/2022/02/04/1069/jumlah-desa-kelurahan-yang-memiliki-fasilitas-sekolah-menurut-kecamatan-dan-tingkat-pendidikan-di-kota-kendari-2018-2020.html>

<https://kendarikota.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>

<https://kendarikota.bps.go.id/stactable/2020/04/22/187/batas-wilayah-kota-kendari-menurut-kecamatan-2017.html>

https://data-sekolah.sekolahkita.net/kecamatan/Kec.%20Kendari%20Barat_5475

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah